

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

DHIMAS WIDYA SAPUTRA

NPP. 30.0535

Asdaf Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: dhimaswidyasaputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri, SE., M.Si, M.Ak

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Regional government financial performance is an analysis carried out to see the extent to which local governments use regional revenue and expenditure budgets effectively and efficiently and are able to maximize regional revenue sources. The contribution of transfer income to the total revenue received by the Regional Government of Bogor Regency is still quite high with an average presentation of 62%. This indicates that the implementation of regional autonomy in Bogor Regency still depends on transfer income. **Purpose:** This study aims to find out how regional financial performance, obstacles, and the right efforts to improve regional financial performance in Bogor Regency. **Method:** The research method uses qualitative methods, is descriptive through an inductive approach. Data collection techniques in research are interviews, observation, and documentation. The theory used in this study uses the theory of financial ratio analysis. **Result:** The results of this study show that the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization is 38.54% in the medium category. The ratio analysis of regional financial independence is 70.28% in the medium category. The ratio of effectiveness of Local Own Revenue is 114.65% which is categorized as very effective. The last ratio of spending efficiency is 93.57% in the less efficient category. **Conclusion:** From the results obtained in the study, it can be concluded that Regional financial performance of Bogor Regency basically supports the implementation of regional autonomy. This is indicated by the results of the ratio of each financial performance indicator.

Keywords: Financial Performance, Ratio Analysis, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien serta mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih cukup tinggi dengan rata-rata presentasi 62%. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor masih tergantung kepada pendapatan transfer. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah, faktor penghambat, dan upaya yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor. **Metode:** Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori analisis rasio keuangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 38,54% dalam kategori sedang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah 70,28% dalam kategori sedang, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah 114,65% dikategorikan sangat efektif, dan rasio efisiensi belanja 93,57% dalam kategori kurang efisien. **Kesimpulan:** Dari hasil yang telah didapatkan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan hasil rasio masing-masing indikator kinerja keuangan.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya. Hal itu diwujudkan melalui asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik di kota maupun kabupaten untuk mengendalikan, mengurus, mengembangkan, dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberikannya otonomi daerah diharapkan mampu mengelola seluruh potensidaerah dengan maksimal demi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia di masa reformasi menggunakan otonomi daerah yang berasaskan pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah adalah penyerahan kewenangan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya dengan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang diatur dalam peraturan tersebut menandakan keseriusan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan konsekuensi terbentuknya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta munculnya sebuah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menjelaskan bahwa implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menciptakan sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang akuntabel, berkeadilan, dan transparan. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.

Otonomi daerah menyebabkan adanya asas desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah mengelola sekaligus menggali potensi sumber daya pada daerahnya masing-masing secara optimal supaya mampu membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah sebagai wujud dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Analisis rasio keuangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Buku yang ditulis Halim (2004: 230) menerangkan bahwa hasil dari analisis rasio keuangan tersebut dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan (2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (4) Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan (5) Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dapat memulihkan kinerja dengan adanya pembandingan dalam pelaksanaannya. Selain itu kinerja keuangan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Desentralisasi sistem pemerintah dalam otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menilai berhasil tidaknya daerah otonom dalam menjalankan tugas yang didesentralisasikan mengingat laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan unsur APBD yang penting sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan transfer bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan daerah dari pendapatan transfer masih mendominasi dalam menutupi belanja daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Bogor masih tergolong tinggi yang bisa dilihat dalam kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

**Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Daerah (RP)	Pendapatan Transfer (Rp)	Kontribusi (%)
2017	6.975.053.078.040	3.927.681.687.764	63
2018	7.300.485.379.647	4.060.626.780.748	62
2019	8.137.989.873.806	4.516.845.358.308	62
2020	7.687.179.717.004	4.280.269.728.409	64
2021	9.124.623.007.868	4.729.476.665.520	59

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Data di atas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan transfer pada tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang berkala pada total pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Hal yang sama terjadi pada pendapatan transfer atau dana perimbangan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer atau dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah mencapai angka 62% yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor.

Kinerja keuangan menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Saraswati dan Yunita (2019: 7) di dalam karya tulis mengatakan bahwa pengukuran kinerja akan memberikan atas rencana yang telah diimplementasikan. Mengukur kinerja keuangan dapat digunakan juga untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Menurut Saragih (2020: 11) pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya.

Melihat dari penjelasan di atas Kabupaten Bogor belum diketahui apakah mampu untuk melaksanakan otonomi daerah tanpa transfer yang diberikan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akan dibahas apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mampu atau belum mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang didesentralisasikan. Demi menunjang urusan pemerintahan harus dilengkapi dengan keuangan yang baik untuk membiayai di dalam pelaksanaannya. Sinergitas upaya pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan kinerja keuangan yang baik

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian pertama oleh Jatnika Dwi Asri (2016) dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. Hasil penelitian deskriptif kuantitatif ini menunjukkan bahwa berdasarkan rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah kota lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten, berdasarkan rasio efektivitas kinerja keuangan relatif tidak bervariasi, dan berdasarkan hasil uji T dan uji MannWhitney tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitasnya..

Penelitian kedua oleh Anindita Primastuti (2019) dengan judul Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sanja. Hasil penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada Pemerintah Desa Sanja masih lemah dan kinerja keuangan Desa Sanja masih kurang baik. Penelitian ketiga oleh Arthaingan H. Muthia (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010- 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Bogor tergolong mencapai peningkatan, rasio kemandirian tergolong konsultatif, rasio efektivitas tergolong efektif, dan rasio pertumbuhan menunjukkan PAD yang fluktuatif.

Penelitian keempat oleh Melina Febi Aawani & Swarmilah Hariani (2021) dengan judul Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015- 2018 dapat dikatakan belum optimal dan berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2018 dapat dikatakan belum optimal. Penelitian kelima oleh Heti Paramita (2019) dengan judul Jurnal Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hasil penelitian kuantitatif deskriptif ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor studi kasus pada tahun 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian menggunakan teori analisis rasio menurut Mahmudi (2016: 140) yang memiliki 4 dimensi, yaitu: (1) Rasio derajat desentralisasi, (2) Rasio Kemandirian keuangan daerah, (3) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan (4) Rasio efisiensi belanja

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, mengetahui faktor penghambat kinerja keuangan, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Bogor.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan menentukan informan berdasarkan pertimbangan yang dianggap memiliki informasi yang lengkap terkait permasalahan yang diangkat.

Informan yang penulis pilih untuk dimintai keterangannya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bogor yang memiliki kapabilitas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dalam pengumpulan data menggunakan wawancara semiterstruktur yang memiliki tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh peneliti pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan orang yang bertugas dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian menjelaskan kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, variabel atau faktor yang menghambat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

3.1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2021

Penelitian yang baik adalah penulisan terstruktur, terarah, sistematis, serta memenuhi kaidah-kaidah karya ilmiah salah satunya disusun berdasarkan teori-teori para pakar. Alat analisis yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor. Data tersebut akan menunjukkan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2017-2021. Demi mencapai tujuan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah perlu didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dapat melaksanakan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mahmudi (2016: 143) yang memiliki 4 dimensi, yaitu: (1) Rasio derajat desentralisasi, (2) Rasio Kemandirian keuangan daerah, (3) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan (4) Rasio efisiensi belanja. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
1	2017	2.593.258.648.374,35	6.975.053.078.040,35	37,17	Sedang
2	2018	2.794.660.740.152,18	7.300.660.740.152,18	38,27	Sedang
3	2019	3.161.165.915.498,00	8.137.989.873.806,00	38,84	Sedang
4	2020	2.810.155.352.282,00	7.687.179.717.004,00	36,55	Sedang
5	2021	3.761.911.243.274,10	9.124.623.007.868,10	41,22	Baik
Rata-Rata		3.024.230.379.916,63	7.845.101.283.374,63	38,54	Sedang

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat desentralisasi Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 sebesar 38,54%. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor cukup mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar 37,17%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 38,27% dan tahun 2019 menjadi 38,84%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 36,65%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 41,22%. Hasil dari perhitungan rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tertinggi mencapai 41,22% yang tergolong kategori baik. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor menunjukkan angka 38,54% dengan kategori sedang. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)
1	2017	2.593.258.648.374,35	3.927.681.687.764,00	66,02
2	2018	2.794.660.740.152,18	4.060.626.780.748,17	68,82
3	2019	3.161.165.915.498,00	4.516.845.358.308,21	69,98
4	2020	2.810.155.352.282,00	4.280.269.728.409,00	65,65
5	2021	3.761.911.243.274,10	4.729.476.665.520,11	79,54
Rata-Rata		3.024.230.379.916,63	4.302.980.044.149,49	70,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 79,54% pada tahun 2021 dan rasio terendah sebesar 66,02% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 kemandirian keuangan terus meningkat setiap tahunnya, yaitu sebesar 68,82% dan 69,98. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 65,65%. Rata-rata kemandirian keuangan kabupaten Bogor menunjukkan presentase 70,28%, jika diukur dengan skala interval antara 50-75 maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bogor pada skala interval sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu mendominasi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pola hubungan menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan Kabupaten Bogor berada pada kategori sedang untuk tahun 2017-2020, sedangkan pada tahun 2021 berkategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa kontribusi pemerintah pusat semakin rendah, dimana tingkat kemandirian Kabupaten Bogor sudah dianggap mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 3
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2017	2.593.258.648.374	2.282.578.507.000	113,61
2	2018	2.794.660.740.152	2.475.535.726.000	112,89
3	2019	3.161.165.915.498	2.676.364.947.000	118,11
4	2020	2.810.155.352.282	2.462.621.761.551	114,11
5	2021	3.761.911.243.274	3.291.322.687.957	114,30
Rata-Rata		3.024.230.379.916	2.637.684.725.901	114,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki presentase rata-rata efektivitas pengelolaan PAD sebesar 114,65%. Dalam skala interval, hal ini berarti Kabupaten Bogor tergolong sangat efektif dalam mengelola PAD. Pada tahun 2017-2021, kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah sudah memuaskan. Total pendapatan mentah daerah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Efektivitas anggaran Kabupaten Bogor dari tahun 2017-2021 tingkat efektivitasnya sudah baik dengan pencapaian targetnya sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Bogor sangat efektif dalam pengelolaan keuangannya yang dapat dinilai dari realisasi mampu melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bogor sangat efektif dalam merealisasikan PAD. Hal tersebut dapat dicapai dibuktikan dengan realisasi pendapatan asli daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 4
Rasio Efisiensi Belanja

No	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (%)
1	2017	6.875.742.319.986,00	7.432.383.155.000,00	92,51
2	2018	7.305.059.632.892,00	7.895.673.760.000,00	92,51
3	2019	7.771.218.179.777,00	8.398.595.484.000,00	92,52
4	2020	8.405.493.380.579,00	8.901.471.622.514,00	94,42
5	2021	8.708.394.133.531,00	9.118.855.702.000,00	95,48
Rata-Rata		7.813.181.529.353,00	8.349.395.944.702,80	93,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Tabel di atas menunjukkan nilai Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017 dan 2018 rasio efisiensi belanja menunjukkan di angka yang sama dengan presentase 92,51%. Kemudian pada tahun 2019 rasio menunjukkan presentase 92,52 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 94,42%. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat kembali dengan presentase sebesar 95,48%. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun anggaran 2017-2021 tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata presentase 93,57%. Artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bogor dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja kurang efektif karena total belanja daerah tidak bisa ditekan sehingga mendekati anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lokasi penulisan mengenai analisis kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa aparatur pemerintah yang mengurus dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor, telah didapatkan informasi terkait faktor penghambat yang ditemukan dalam kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih dalam kategori kurang efisien. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia seperti operator yang mampu mengoperasikan sistem informasi keuangan dengan baik di dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan temuan wawancara yang dilakukan penulis.

b. Adanya Pandemi *Covid-19*

Kendala yang dihadapi dalam kinerja keuangan daerah adalah adanya aktivitas masyarakat yang dibatasi akibat adanya Pandemi *Covid-19*. Meskipun di dalam merealisasikan anggaran Kabupaten Bogor telah melampaui target, akan tetapi dalam pelaksanaan merealisasikan anggaran tersebut kami sangat kesulitan akibat adanya pandemic *Covid-19*. Hal itu disebabkan karena aktivitas masyarakat yang dibatasi dan wajib pajak dan wajib retribusi yang kesulitan dalam membayarnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh ke dalam kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Bogor.

c. Belum Maksimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi

Salah satu faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan berkurang adalah belum maksimalnya penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem informasi. Hal tersebut dibuktikan dengan perencanaan dan penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menggunakan Simral. Simral adalah aplikasi Sistem informasi perencanaan keuangan daerah yang berbasis *web* dan *open source* yang dikembangkan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun dalam penatausahannya menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan belum terintegrasinya sistem informasi keuangan yang dimiliki Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menggunakan dua aplikasi sistem informasi. Sehingga belum adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Faktor penghambat tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar pemerintahan itu sendiri. Namun dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor dengan berbagai keterbatasan dan beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kompetensi pegawai

Peningkatan kemampuan pegawai merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Bogor. Hal ini terus dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna mewujudkan kabupaten Bogor yang mandiri dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan memberikan pegawai diklat dan seminar yang berguna dalam pengelolaan keuangan daerah, baik secara daring maupun tatap muka.

b. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi dan Pengembangan Pembayaran Non Tunai

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran pajak dan membantu pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerah. Pada zaman sekarang ini digitalisasi merupakan sebuah keharusan dalam pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pelayanannya.

Pembayaran non tunai sebagai terobosan agar memudahkan masyarakat membayar pajak sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya tersebut merupakan sebuah terobosan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor.

c. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Mengenai Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang saat ini digunakan. Hal tersebut dilakukan mengingat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya saran dari pemerintah daerah diharapkan Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2021. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 5 tahun terakhir (2017-2021) dianalisis melalui analisis rasio keuangan yang indikatornya mencakup pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 secara umum cenderung meningkat. Apabila dilihat dari presentase ketercapaian target yang ditetapkan, sektor pendapatan secara keseluruhan mampu mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target tercapai pada pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017-2021, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2019 dan 2021.

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Berdasarkan hasil penelitian total pendapatan asli daerah didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Tetapi pajak daerah di Kabupaten Bogor mengalami keadaan fluktuatif dengan penurunan pendapatan pada tahun tertentu. Berdasarkan data pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah dengan rata-rata sebesar 1,98 Triliun. Kemudian penopang kedua adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 772,79 Milyar. Selanjutnya faktor penerimaan terbesar ketiga bersumber dari Retribusi daerah dengan rata-rata sebesar 132,02 Milyar. Terakhir sumber penerimaan berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 56,91 Milyar.

Kabupaten Bogor tidak hanya memiliki sumber pendapatan internal, melainkan memperoleh sumber pendapatan lain yang berasal dari pendapatan transfer yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi Kabupaten Bogor. Berdasarkan penelitian yang dijelaskan penulis pada latar belakang menunjukkan bahwa pada tahun pendapatan transfer Kabupaten Bogor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 pendapatan transfer Kabupaten Bogor sebesar 3,92 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4,06 triliun dan pada tahun 2019 menjadi 4,51 triliun. Pada tahun 2020 pendapatan transfer Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 4,28 triliun dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 4,72 triliun. Rata-rata kontribusi dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah mencapai angka 62% yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tidak tercapai secara maksimal disebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah kabupaten Bogor yang masih terbelang besar terhadap dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor. Apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dimana ketergantungan keuangan Kabupaten Bogor terhadap dana transfer akan semakin meningkat dan sebaliknya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bogor akan semakin menurun.

IV. KESIMPULAN

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan hasil rasio masing-masing indikator kinerja keuangan sebagai berikut:

- a) Hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bogor menunjukkan angka rata-rata 38,54%, Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Bogor tergolong kategori sedang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah
- b) Hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan rata-rata 70,28%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kemandirian keuangan pada skala interval sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dengan adanya pendapatan transfer.
- c) Hasil analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor berada pada rata-rata 114,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah termasuk dalam kategori sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah
- d) Hasil analisis Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Bogor berada pada angka rata-rata 93,57%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kurang efisien dalam mengelola anggaran belanja di Kabupaten Bogor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini OPD sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada penulis lainnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam, bisa dibandingkan, serta dapat melihat perkembangan kinerja keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bogor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA BUKU DAN JURNAL

- Asri, Jatnika Dwi. 2016. “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Muthia, Arthaingan H. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010- 2014.” *Jurnal Vokasi Indonesia*.
- Primastuti, Anindita. 2019. “Akuntabilitas Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sanja.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*.
- Rioni, D. Saraswati dan Yunita Sari. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*.
- Siregar, F. Saragih dan I. A. 2020. “Analisis Rasio Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing.”

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah